Al-Takzim: ***Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat***
Volume 2, Issue 1, June 2026, pages 1-10
Online ISSN: *3164-4465,* ***DOI:*** *10.70095.101*
Copyright © 2026 Al-Takzim All Right Reserved
https://al-takzim.syekhnurjati.id/index.php/altakzim/index

Pemetaan Potensi Ekonomi Masyarakat Daerah 3T Berbasis Komoditas Unggulan di Desa Buningara Majalaengka

Toto Suharto[1], Turasih[2], Suciyadi Ramdhani[3]
[123] UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: *toharto68@gmail.com[1], turasih@gmail.com[2], suciyadiramdhani@gmail.com*

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords
Pembangunan Desa, Potensi Desa, Komoditas Unggulan

Article history
Received: *Jan 2026*
Revised: *March 2026*
Accepted: *Mei 2026*
Available online: *June 2026*

ABSTRACT

The transformation of village development needs to be supported by village potential-based planning. One of the efforts implemented to support village development planning by carried out through village potential mapping activities based on village leading commodities. The village potential mapping based on its leading commodities encourages the economic potential of the village to grow and supports the village's original income. The assistance is carried out in order to support the acceleration of development transformation in Buninagara Village, Malausma Subdistrict, Majalengka Regency, West Java. The purpose of this activity is so that Buninagara Village has a plan that is in accordance with its potential. The results of the activity are a map of the village potential based on leading commodities, a profile book of village potential based on leading commodities, and a profile village video. The activity method applied in a participatory way involving multistakeholder participation including village government, village institutions, the community, and expert assistance through Asset Based Community Development (ABCD) approach in a paricipative way..

.

Copyright © 2026 Authors
This is an open-access article under CC-BY 4.0 license

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi wilayah pada hakikatnya merupakan proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah secara optimal. Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan antardaerah, terutama antara kawasan perkotaan dengan wilayah perdesaan yang tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program percepatan pembangunan desa melalui kebijakan Dana Desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kenyataannya masih banyak desa yang belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum tersedianya pemetaan potensi ekonomi yang komprehensif sehingga kebijakan pembangunan desa sering kali bersifat seragam (*one size fits all*), kurang mempertimbangkan karakteristik lokal, dan belum berbasis pada keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing wilayah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang selaras dengan karakter desa dan kebutuhan masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan yang memadai yaitu melalui optimalisasi potensi desa (Bawono & Setyadi, 2019). Soleh (2017) menjelaskan bahwa pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting yang berkorelasi dengan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan desa di Indonesia salah satunya berdasarkan kategori indeksasi berupa Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Ketiga indeks tersebut mempengaruhi perkembangan desa yang dilihat dari statusnya yaitu sebagai desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, berkembang, Maju, dan Mandiri. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa (idm.kemendesa.go.id).

Desa merupakan satu kesatuan entitas wilayah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki karakteristik khas. Tipologi desa mempertemukan antara konsep sumber daya alam, konsep pemberdayaan masyarakat, pola nafkah, dan aspek kewilayahan (Agusta & Fujiartanto, 2014). Merujuk pada undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, saat ini desa diberikan rekognisi untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensinya. Hak dan kewajiban desa diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang berisi bahwa desa berhak untuk: (a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (b) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; serta (c) memperoleh sumber pendapatan.

Sejalan dengan hak, desa juga memiliki kewajiban meliputi: (a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat Desa; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi; (d) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (e) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Desa Buninagara adalah salah satu desa di Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka yang telah memiliki status desa maju pada tahun 2021 berdasarkan IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Status desa maju merupakan kondisi yang sudah dapat dikatakan baik, namun masih harus melewati tahapan menuju desa mandiri. Terdapat kondisi yang menyebabkan Desa Buninagara belum menjadi desa mandiri yaitu belum adanya sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan menjadi nilai tambah dan memberikan dorongan pertumbuhan wilayah.

Dalam rangka mendukung akselerasi transformasi desa Buninagara dari status maju menuju mandiri, khususnya mewujudkan sumber pendapatan asli desa, diperlukan perencanaan yang matang sesuai dengan potensi wilayah. Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melakukan pemetaan potensi desa berdasarkan komoditas unggulannya. Dengan kesadaran bahwa terdapat banyak potensi desa yang belum dimaksimalkan, sekaligus keterbatasan sumberdaya manusia yang mampu mengoperasionalkan kebutuhan pemetaan potensi desa berbasis komoditas unggulan dalam bentuk aktivitas riil, maka diperlukan pendampingan. Harapannya melalui pendampingan tersebut akan muncul juga potensi sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan estafet perencanaan, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun pemetaan potensi desa berbasis komoditas unggulan di masa yang akan datang.

Pemetaan potensi desa ditujukan untuk mengetahui berbagai potensi yang terdapat di wilayah pedesaan, mengetahui kondisi ruang desa, kemudian menggunakannya sebagai rujukan pembangunan desa baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Yulianto, *et al.,* 2021; Setiawan, *et al.,* 2020; Salmiah, *et al.,* 2020; Suwondo, *et al.,* 2020). Merujuk data tahun 2019 (BPS Kabupaten Majalengka, 2019), pada aspek kependudukan Desa Buninagara memiliki penduduk sebanyak 3.352 jiwa yang terdiir dari 1.686 laki-laki dan 1.666 perempuan dengan *sex ratio* 101,2. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,81. Wilayah Desa terdiri dari 5 dusun, 4 RW dan 16 RT yang meliputi Dusun Desa, Dusun Cidramaning, Dusun Sukaluyu, Dusun Cikidang, dan Dusun Haurendeng. Potensi sektor pendukung perekonomian desa terutama dari pertanian, warung, dan industri rumahan.

Dengan potensi yang ada, saat ini di Desa Buninagara masih memiliki keterbatasan terutama pada aspek pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun peta potensi desa berbasis komoditas unggulan. Berdasarkan kebutuhan, pemetaan potensi desa berbasis komoditas unggulan tersebut diperlukan dalam rangka mendorong kapasitas desa untuk bisa menciptakan peluang sumber pendapatan asli desa yang menjadi salah satu indikator kemandirian desa.

Kajian Literatur

Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal merupakan salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Konsep ini menekankan bahwa setiap wilayah memiliki sumber daya ekonomi yang bersifat khas (endogenous resources) yang dapat dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal. Dalam perspektif ekonomi regional, pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dari luar, tetapi juga oleh kemampuan suatu daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mengembangkan sektor basis serta komoditas unggulan yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Oleh karena itu, pemetaan potensi ekonomi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa identifikasi komoditas unggulan melalui pendekatan seperti *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, maupun analisis spasial mampu memberikan gambaran mengenai sektor ekonomi yang layak diprioritaskan sebagai motor penggerak pertumbuhan daerah. (Jannah et al, 2025)

Teori pembangunan ekonomi endogen (*Endogenous Growth Theory*) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh akumulasi modal manusia, inovasi, kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif. Dalam konteks pedesaan, keberadaan komoditas unggulan bukan sekadar menghasilkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan kesempatan kerja, berkembangnya usaha mikro dan kecil, tumbuhnya industri pengolahan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan lokal. Pendekatan ini semakin relevan diterapkan pada wilayah 3T yang umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan investasi. Dengan demikian, strategi pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada bantuan pemerintah, tetapi harus diarahkan pada penguatan daya saing komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi hilirisasi .

Konsep komoditas unggulan (*leading commodity*) sendiri mengacu pada komoditas yang memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan wilayah lain, baik dari sisi produktivitas, kontribusi terhadap perekonomian, maupun peluang pengembangan di masa depan. Menurut teori *economic base*, sektor basis merupakan sektor yang menghasilkan surplus dan mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa identifikasi komoditas unggulan dengan metode *Location Quotient* yang dikombinasikan dengan *Shift Share*, SWOT, maupun analisis rantai nilai (*value chain analysis*) mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain mengidentifikasi komoditas potensial, pendekatan tersebut juga mampu memetakan hambatan struktural seperti rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan akses pembiayaan, serta rendahnya nilai tambah akibat dominasi penjualan produk primer. (Setiawan et al, 2020)

Dalam konteks pembangunan wilayah pedesaan, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) juga menjadi landasan penting dalam memetakan potensi ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan dengan memanfaatkan aset yang telah dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan lokal, budaya, maupun jejaring sosial. Melalui pemetaan aset ekonomi tersebut, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi pengembangan yang sesuai dengan karakteristik lokal sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini berbeda dengan pembangunan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang cenderung berorientasi pada kekurangan dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal (Irawan, 2020).

Penelitian mengenai pemetaan komoditas unggulan di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan komoditas potensial, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur, aksesibilitas, kelembagaan ekonomi, teknologi pengolahan, dan konektivitas pasar. Analisis spasial terhadap komoditas pangan maupun perkebunan membuktikan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik komoditas yang berbeda sehingga strategi pengembangannya tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, pemetaan potensi ekonomi perlu diintegrasikan dengan analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta peluang hilirisasi agar menghasilkan strategi pembangunan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal (Wartoyo et al, 2025).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada identifikasi komoditas unggulan di tingkat kabupaten atau kawasan transmigrasi, penelitian ini menitikberatkan pada pemetaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sebagai unit pembangunan terkecil, khususnya pada wilayah 3T. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan peta potensi ekonomi berbasis komoditas unggulan yang tidak hanya mengidentifikasi sektor basis, tetapi juga menggambarkan keterkaitan antara potensi sumber daya lokal, kapasitas masyarakat, serta peluang pengembangan ekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan investasi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi regional dan pembangunan berbasis potensi lokal, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah 3T yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Pengabdian

Dalam penelitian ekonomi regional, identifikasi komoditas unggulan umumnya dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif seperti Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share Analysis, Klassen Typology, maupun Analytical Hierarchy Process (AHP) yang kemudian dipadukan dengan analisis kualitatif seperti SWOT, Value Chain Analysis, dan stakeholder analysis. Pendekatan tersebut tidak hanya mampu mengidentifikasi sektor basis, tetapi juga memberikan informasi mengenai dinamika pertumbuhan, tingkat daya saing, serta prospek pengembangan suatu komoditas pada masa mendatang. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih

berorientasi pada skala kabupaten atau provinsi sehingga kurang memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat pada level desa. Padahal, desa merupakan unit pembangunan terkecil yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologis yang sangat spesifik.

Selain pendekatan ekonomi regional, penelitian ini juga didasarkan pada konsep Asset-Based Community Development (ABCD) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Berbeda dengan pendekatan *needs-based* yang berorientasi pada berbagai kekurangan masyarakat, pendekatan ABCD memandang bahwa setiap komunitas memiliki aset yang dapat dikembangkan menjadi modal pembangunan. Aset tersebut mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, jaringan sosial, kelembagaan, budaya lokal, hingga infrastruktur yang telah tersedia. Dengan demikian, pemetaan potensi ekonomi tidak hanya bertujuan mengidentifikasi komoditas unggulan, tetapi juga memetakan kapasitas masyarakat dalam mengelola komoditas tersebut sehingga pembangunan ekonomi desa menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh 3 Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkolaborasi dengan 7 mahasiswa. Sasaran pengabdian adalah pemerintah dan masyarakat Desa Buninagara, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pengabdian ini menggunakan metode partisipatif dengan pendekatan *asset based community development* (ABCD). ABCD merupakan pendekatan yang berfokus untuk mencari dan memobilisasi sumber daya yang telah ada pada suatu komunitas. Pendekatan ABCD menyajikan cara bagi warga komunitas untuk menemukan dan menggerakkan apa yang telah mereka miliki dalam mewujudkan komunitas yang lebih kuat (Green & Goetting, 2010). Proses kegiatan yang dilaksanakan meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Buninagara, pelaksanaan pemetaan potensi komoditas unggulan bersama masyarakat, penyusunan hasil berdasarkan data yang diperoleh, dan ekspose hasil serta penyusunan rencana tindak lanjut. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai tanggal 01 Oktober 2021 hingga 30 November 2021.

.

Hasil Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan di Desa Buninagara menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam menghasilkan data pembangunan desa yang lebih akurat, kontekstual, dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Berbeda dengan pemetaan yang hanya mengandalkan data sekunder, kegiatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi potensi, verifikasi data lapangan, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan bahwa masyarakat lokal merupakan pemilik pengetahuan (*local knowledge*) mengenai kondisi wilayahnya sehingga keterlibatan mereka akan meningkatkan kualitas informasi sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Tahapan koordinasi dengan Pemerintah Desa Buninagara menjadi fondasi penting dalam membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pemerintah desa tidak hanya memperlancar proses pengumpulan data, tetapi juga meningkatkan peluang pemanfaatan hasil pemetaan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa,

seperti RPJMDes, RKPDes, maupun penyusunan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemetaan potensi desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola pemerintahan desa (*local governance*) dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Tanpa adanya dukungan kelembagaan, hasil pemetaan sering kali berhenti sebagai dokumen administratif yang tidak terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada dua tahapan memberikan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. FGD tahap pertama berfungsi sebagai mekanisme eksplorasi awal untuk mengidentifikasi berbagai aset yang dimiliki desa, sedangkan FGD tahap kedua berfungsi sebagai proses validasi (*member checking*) terhadap hasil observasi lapangan. Mekanisme validasi ini meningkatkan kredibilitas data karena informasi yang diperoleh melalui observasi tidak langsung diterima sebagai fakta, tetapi dikonfirmasi kembali bersama masyarakat dan pemerintah desa. Pendekatan ini memperkuat kualitas data sekaligus meminimalkan bias persepsi peneliti dalam mengidentifikasi potensi desa.

Kegiatan ini menggunakan kerangka Asset-Based Community Development (ABCD) sebagai dasar pemetaan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan (*needs-based approach*), ABCD memandang bahwa setiap komunitas memiliki aset yang dapat dikembangkan menjadi modal pembangunan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Desa Buninagara memiliki lima kelompok aset utama, yaitu aset sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia. Kelima aset tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk kapasitas pembangunan desa.

Dari aspek sumber daya alam, Desa Buninagara memiliki potensi pertanian, perkebunan, tegalan, serta objek wisata alam berupa air terjun. Namun demikian, hasil diskusi bersama masyarakat menghasilkan temuan yang menarik bahwa komoditas padi tidak diposisikan sebagai komoditas unggulan komersial, melainkan sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat desa. Keputusan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan pangan lokal. Temuan tersebut mencerminkan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable rural development*), yaitu keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, identifikasi komoditas unggulan tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tetapi juga fungsi strategis suatu komoditas bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, hasil penelusuran lapangan menunjukkan bahwa kerajinan bambu dan industri makanan rumahan memiliki prospek yang lebih besar sebagai komoditas unggulan desa. Kedua sektor tersebut memiliki karakteristik sebagai usaha berbasis rumah tangga yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan penjualan hasil pertanian primer. Dari perspektif Value Chain Analysis, produk kerajinan bambu maupun olahan pangan memberikan peluang hilirisasi karena proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran dapat dilakukan di tingkat desa. Kondisi ini memungkinkan terciptanya efek berganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja lokal, serta berkembangnya usaha mikro berbasis komunitas.

Hasil pemetaan juga menunjukkan bahwa aset sumber daya sosial Desa Buninagara relatif kuat melalui keberadaan berbagai kelembagaan masyarakat. Modal sosial tersebut merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi desa karena mampu memperkuat kerja sama, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dalam perspektif teori Social Capital yang dikemukakan oleh Putnam, keberhasilan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal finansial, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan jaringan kerja sama yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan desa seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, UMKM, maupun BUMDes menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan komoditas unggulan.

Di sisi lain, hasil pemetaan juga mengidentifikasi beberapa tantangan pembangunan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia produktif akibat tingginya mobilitas penduduk usia kerja yang memilih merantau ke luar daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya gejala *rural outmigration*, yaitu perpindahan tenaga kerja produktif dari desa menuju kota karena keterbatasan kesempatan kerja lokal. Akibatnya, sebagian besar penduduk yang menetap di desa didominasi oleh kelompok usia lanjut sehingga kapasitas inovasi dan produktivitas ekonomi menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pengembangan komoditas unggulan apabila tidak diimbangi dengan strategi regenerasi pelaku usaha dan peningkatan kapasitas generasi muda .

Dari aspek sumber daya finansial, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan desa masih sangat bergantung pada Dana Desa dan bantuan pemerintah. Ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan ekonomi desa masih relatif rendah. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk mengembangkan model pembiayaan alternatif melalui penguatan BUMDes, kemitraan dengan sektor swasta, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun pembentukan koperasi berbasis komoditas unggulan. Diversifikasi pembiayaan menjadi prasyarat penting agar pengembangan ekonomi desa tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah.

Sementara itu, kondisi infrastruktur fisik yang relatif baik merupakan modal penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan, sarana publik, dan fasilitas dasar yang telah dibangun melalui Dana Desa dapat meningkatkan aksesibilitas distribusi produk serta menurunkan biaya logistik. Namun demikian, infrastruktur fisik tersebut perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti pusat pemasaran, rumah produksi bersama, gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan infrastruktur digital agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar (Yulianto, 2021).

Salah satu kontribusi utama kegiatan ini adalah penggunaan aplikasi Avenza Maps dalam proses pemetaan spasial desa. Pemanfaatan teknologi geospasial memungkinkan setiap potensi ekonomi memiliki koordinat yang jelas sehingga menghasilkan peta desa yang lebih akurat dibandingkan pemetaan konvensional. Integrasi data spasial dengan data sosial-ekonomi memberikan manfaat strategis bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis wilayah. Misalnya, lokasi sentra kerajinan bambu, kawasan pertanian, industri rumah tangga, maupun objek wisata dapat dipetakan secara

digital sehingga mempermudah proses perencanaan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi desa.

Lebih jauh, hasil kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk fisik berupa peta potensi, buku profil desa, dan video profil desa, tetapi juga menghasilkan basis data pembangunan desa yang dapat diperbarui secara berkala. Basis data tersebut memiliki nilai strategis karena mampu mendukung implementasi pembangunan berbasis bukti (*evidence-based village planning*). Selama ini banyak desa menyusun program pembangunan berdasarkan persepsi atau usulan sektoral, sedangkan hasil kegiatan ini menyediakan informasi yang lebih sistematis mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan desa. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki dasar yang lebih objektif dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa maupun penyusunan program pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi berupa pengembangan model pemetaan desa yang mengintegrasikan pendekatan ABCD, Participatory Rural Appraisal (PRA), pemetaan geospasial, dan analisis komoditas unggulan. Integrasi tersebut menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan model pemetaan desa yang hanya berorientasi pada inventarisasi aset atau identifikasi komoditas semata. Model ini dapat direplikasi pada desa-desa lain, khususnya wilayah 3T, dengan menyesuaikan karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologinya.

Secara praktis, hasil pemetaan menunjukkan bahwa arah pembangunan Desa Buninagara sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi sektor primer, tetapi diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan industri kerajinan bambu, pengembangan produk pangan lokal, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, digitalisasi pemasaran UMKM, serta optimalisasi fungsi BUMDes sebagai lembaga bisnis desa. Pendekatan ini akan menciptakan struktur ekonomi desa yang lebih resilien, mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian primer, dan membuka peluang kerja baru bagi generasi muda sehingga dapat menekan arus urbanisasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pemetaan potensi desa berbasis komoditas unggulan bukan sekadar menghasilkan dokumen profil desa, melainkan membangun fondasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal. Dengan mengintegrasikan aset masyarakat, teknologi pemetaan, dan analisis komoditas unggulan, hasil kegiatan ini menjadi instrumen strategis bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal Desa Buninagara. Selain itu, model yang dihasilkan memiliki potensi untuk direplikasi pada desa-desa lain sebagai pendekatan inovatif dalam mendukung implementasi pembangunan desa berbasis potensi lokal di Indonesia.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Buninagara, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memetakan potensi ekonomi desa berbasis komoditas unggulan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat secara aktif. Kegiatan ini

menghasilkan tiga luaran utama, yaitu buku profil Desa Buninagara berbasis komoditas unggulan**,** peta potensi desa yang memuat fasilitas, sumber daya, dan sebaran komoditas unggulan**,** serta video profil desa sebagai media promosi dan diseminasi informasi. Luaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai basis data pembangunan desa **(***evidence-based village planning***)** yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perencanaan investasi, serta strategi pengembangan ekonomi lokal. Hasil pemetaan juga mengidentifikasi bahwa sektor kerajinan bambu dan industri pangan rumah tangga memiliki prospek sebagai komoditas unggulan yang berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, sedangkan sektor pertanian padi lebih diarahkan sebagai penopang ketahanan pangan desa.

Selain menghasilkan luaran yang bersifat fisik, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan potensi desanya secara lebih sistematis. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan memperkuat validitas data, meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pemetaan, serta mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi praktis berupa model pemetaan potensi desa yang mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis aset, pemetaan geospasial, dan identifikasi komoditas unggulan, sehingga dapat direplikasi pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa.

Ke depan, hasil pengabdian ini diharapkan tidak berhenti pada penyusunan dokumen pemetaan, tetapi menjadi titik awal bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah, khususnya dalam pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, penguatan kelembagaan ekonomi desa, hilirisasi produk lokal, serta digitalisasi pemasaran UMKM. Integrasi hasil pemetaan dengan kebijakan pembangunan desa diharapkan mampu mempercepat transformasi Desa Buninagara menuju desa mandiri yang memiliki daya saing ekonomi, ketahanan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, model pengabdian ini dapat menjadi best practice bagi perguruan tinggi dalam mendukung implementasi pembangunan desa berbasis potensi lokal melalui kolaborasi yang erat antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Referensi

Agusta, I., Fujiartanto (ed). (2014). Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bawono, I.R., Setyadi, E. 2019. Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

BPS Kabupaten Majalengka. (2019). Kecamatan Malausma Dalam Angka. Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka.

Green, G.P., Goetting, A (ed). 2010. Mobilizing Communities, Asset Building as a Community Development Strategy. Philadelphia: Temple University Press.

Irawan, E. (2020). Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Kebijakan Local Economic Development Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. Nusantara Journal

of Economic (NJE) Vol. 02, No. 02 Desember 2020. DOI: https://doi.org/10.37673/nje.v2i02.

Jannah, I., Anwar, A. M. A. W. K., & Wartoyo, W. (2025). Strategi Pengembangan Wisata Religi Plangon dengan Menggunakan Pendekatan Pentahelix. Journal of Sharia Tourism and Hospitality, 3(1), 45-59.

Layaman, L., Wartoyo, W., & Ghoni, A. (2024). Pengelolaan Jurnal Ilmiah Berkala: Upaya Menuju Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 1670-1677.

Matthoriq, Zauhar, S., Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata Desa "Bumiaji Agrotourism" di Kota Wisata Batu. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 7 No. 1, pp 20-29, 2021. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3.

Nurhendi, S., Fatahillah, M., Aziz, A., & Wiradinata, R. (2026). Developing a Local Wisdom-Based Learning Model through Sugarcane Bagasse Cracker Innovation to Enhance Elementary Students' Social Competence and Economic Independence. EduBase: Journal of Basic Education, 7(1), 46-51.

Putri, N. F., Wartoyo, W., & Sukardi, D. (2025). Minat Beli Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Tirta Jati. Tirtayasa Ekonomika, 20(2), 210-226.

Salmiah, N., Nanda, S.T., Adino, I. (2020). Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengembangan Unit Usaha Bumdes Tamer Mandiri. SULUH Jurnal Abdimas Vol. 1 (2) (Februari 2020) hal: 105-113. DOI: https://doi.org/10.35814/suluh.v1i2.1050.

Setiawan, B., Latifah, S., Idris, M.H., Hidayati, E, Valentino, N., Mudhofir. (2020). Pemetaan Potensi Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Menuju Desa Wisata Berbasis Kawasan. [Prosiding]. Prosiding PEPADU 2020 Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 LPPM Universitas Mataram Vol. 2, 2020 e-ISSN: 2715-5811.

Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-5. https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181.

Suwondo, Syahza, A., Galib, M., Oktarianda, R. (2020). Pengembangan Peta Potensi Desa Berbasis Spasial Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Jurnal Hilirisasi IPTEKS Vol. 3 No. 3, September 2020. DOI: https://doi.org/10.25077/jhi.v3i3.

Wartoyo, W., Mulsim, M. I., Melandari, E., Farrakhan, S. A., & Hanami, A. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui KKN Kolaboratif di Desa Cigobang Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 21-32.

Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Ahdi, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Berbasis Masjid (KSBM) di Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 19-29.

Wartoyo, W. (2013). Akuntansi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Historis. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 5(1).

Yulianto, Melinda, S.D., Fahmi, T., Hidayati, D.A., Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi

Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021) hal. 1-8. DOI: https://10.24198/sawala.v2i1.28476.